

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KAPOLRI**

**-----
(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : VIII
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Acara Rapat : Rencana Strategis Polri dan Hapsem BPK Semester I 2019
Hari/ tanggal : Hari Rabu/ 20 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 – 18.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Herman Herry/ Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI.
Hadir : 5 (lima) orang Pimpinan, 38 (tiga puluh delapan) orang anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI dari 9 (sembilan) Fraksi

I. PENDAHULUAN

Rapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Rencana Strategis Kepolisian Negara RI
- Hapsem BPK Semester I Tahun 2019
- Tanya – Jawab
- Kesimpulan/Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

A. Beberapa hal yang disampaikan oleh Pimpinan Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kapolri perlu memberikan penjelasan mengenai bom Mapolresta Medan karena ada kesan di masyarakat bahwa negara menciptakan teroris.
2. Sejauh mana koordinasi Polri dengan BNPT dan BNN.
3. Kapolri perlu menjelaskan kedudukan Komjen. Firly Bahuri sebagai Kabaharkam dan akan dilantik menjadi Ketua KPK pada Desember 2019.
4. Menyampaikan apresiasi Polri dan Densus 88 dalam menciptakan rasa aman di masyarakat.
5. Diharapkan agar Kapolri segera melaksanakan pembangunan gedung Polres di daerah pemekaran.

B. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir:

o Nilai AKIP:

Tahun	Nilai	Kategori	Peningkatan/ Penurunan
2013	60,02	CC	-
2014	65,10	B	+5,08
2015	68,04	B	+2,94
2016	70,90	BB	+2,84
2017	72,11	BB	+1,21
2018	74,08	BB	+1,97

o Indeks Reformasi Birokrasi:

Tahun	Nilai	Kategori	Peningkatan/ Penurunan
2014	60,6	CC	-
2015	67,23	B	+6,63
2016	71,9	BB	+4,67
2017	73,64	BB	+1,74
2018	75,18	BB	+1,54

- o Pengelolaan keuangan Polri yang dinilai oleh BPK RI, Polri berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2014 s.d. 2018.

2. Sinergitas penegakan hukum dengan Aparat Penegak Hukum lainnya dalam rangka *Integrated Criminal Justice System*.

o Kerja sama sinergis dengan APH lain adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan rapat koordinasi.
- Melakukan pelatihan bersama, *workshop* dan seminar dengan peserta dari Polri, Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum lainnya.
- Pelaksanaan koordinasi dan gelar perkara bersama (*expose kasus*) sejak awal penyelidikan dengan Kejaksaan untuk mengoptimalkan langkah penyidikan Polri dan penuntunan Kejaksaan.
- Memberikan bantuan pengamanan terhadap operasional APH lainnya, Kejaksaan dan Pengadilan.
- Tukar menukar informasi dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas masing-masing instansi.

3. Pengungkapan kasus-kasus aktual (peredaran narkoba) yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat.

o Pengungkapan kasus narkoba sejak tahun 2015 s.d. Sept 2019.

No	Tahun	Kasus					Jumlah
		Narkotika	Psikotropika	Baya	Psikoaktif Baru	Obat Berbahaya	
1	2015	27.950	885	9.837	2	1.579	40.253
2	2016	35.403	1.539	9.824	1	1.000	47.767
3	2017	35.440	3.652	10.241	26	1.115	50.474
4	2018	39.429	1.524	2.905	109	1.270	45.237
5	Sept 2019	27.399	435	465	93	813	29.205
JUMLAH							212.936

- o Jumlah barang bukti tahun 2016 s.d. 2019.

No	Jenis	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019 (Jan-Sept)
1	Shabu	1,64 Ton	2,69 Ton	4,6 Ton	2,7 Ton
2	Heroin	1.680,56 Gr	204,37 Gr	1.406,52 Gr	16.212,4 Gr
3	Kokain	98,99 Gr	68,47 Gr	8.385,38 Gr	1.963,52 Gr
4	Hashish	2.982,96 Gr	33,44 Gr	2.494,14 Gr	20,41 Gr
5	Ekstasi	1.113.274 Btr	2.782.650 Btr	1.062.686,3 Btr	660.445,88 Btr + 2 Gr
6	Ganja	11,19 Ton	150,65 Ton	33,95 Ton	4,6 Ton
7	Ladang Ganja	42,5 Hektar	72 Hektar	44,5 Hektar	-
8	Tembakau Gorilla	-	42.903,99 Gr	4.833,33 Gr	9.043,69 Gr

- o Jumlah Tersangka kasus narkoba tahun 2015 s.d. 2019.

No	Tahun	Kasus					Jumlah
		Narkotika	Psikotropika	Baya	Psikoaktif Baru	Obat Berbahaya	
1	2015	37.012	1.000	10.360	2	1.804	50.178
2	2016	46.032	1.770	11.276	1	1.308	60.387
3	2017	46.683	4.177	10.841	28	1.379	63.108
4	2018	51.611	1.744	3.066	162	1.408	57.991
5	Sept 2019	35.318	521	468	111	919	37.337
JUMLAH							269.001

- o Jalur-jalur yang digunakan oleh sindikat narkoba untuk memasukkan narkoba ke Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Aceh melalui Pelabuhan Bireuen, Sungai Iyu Aceh Tamiang serta Pelabuhan Rakyat Langsa;
 - Sumatera Utara melalui Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Laut Belawan serta Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai;
 - Riau melalui Sungai Siak ke Pekanbaru dan Dumai;
 - DKI Jakarta melalui Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok;
 - Kaltim melalui Nunukan, Bandara Sepinggian Balikpapan dan Berau;
 - Kaltara melalui Tarakan, Pelabuhan Nunukan dan Sebatik Timur;
 - Kalbar melalui perbatasan darat Entikong
 - Perbatasan Papua New Guinea;
 - Timor Leste dengan NTT.
- o Beberapa pengungkapan kasus narkoba yang menonjol antara lain:
 - Pengungkapan Jaringan Internasional (Malaysia) dengan barang bukti 40 Kg Sabu, 40.000 Butir Ekstasi, dan 1.000 Gram Ketamin.
 - Pengungkapan kasus narkotika Jaringan Internasional Thailand-Indonesia melalui paket kargo dengan barang bukti 30 kg Sabu.

4. Pengungkapan kasus-kasus aktual (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat.
 - Berdasarkan hasil penyidikan berikut diuraikan jalur perlintasan para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Jakarta – Batam – Malaysia (transit) – Kawasan Timur Tengah (Negara Tujuan)
 - Bandung – Batam – Malaysia (transit) – Kawasan Timur Tengah (Negara Tujuan)
 - Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia (transit) – Kawasan Timur Tengah (Negara Tujuan)
 - NTB – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia (Transit) - Kawasan Timur Tengah (Negara Tujuan)
 - NTT – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia (Transit) - Kawasan Timur Tengah (Negara Tujuan)
 - Pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menonjol adalah pengungkapan kasus dengan modus operandi beasiswa kuliah namun dipekerjakan sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan.
5. Pengungkapan kasus-kasus aktual (Korupsi) yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat.
 - Beberapa pengungkapan kasus tindak pidana yang menonjol yaitu:
 - Pengungkapan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kios pada Garut Super Block (GSB).
 - Pengungkapan kasus Dugaan Tindak Pidana Penyuaapan pertandingan pada Liga 2 Indonesia Tahun 2018.
6. Pengungkapan kasus-kasus aktual (Korupsi) yang menjadi isu nasional yang menarik perhatian masyarakat.
 - Strategi pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan melalui pendekatan lunak (*soft approach*) dan pendekatan keras (*hard approach*). Pendekatan lunak (*soft approach*) dilakukan dengan upaya deradikalisasi, kontraradikalisasi, kontraideologi, memutus saluran dan meminimalisir faktor penyebab. Sedangkan pendekatan keras (*hard approach*) dilakukan dengan upaya penegakan hukum secara tegas dan guna mencegah terjadinya aksi teror (*preemptive strike*).
 - Beberapa pengungkapan kasus tindak pidana terorisme yang menjadi perhatian publik yaitu:
 - Pengungkapan kasus penyerangan terhadap Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto di alun-alun Menes Kab. Pandeglang Banten.
 - Pengungkapan kasus bom bunuh Mapolresta Medan.

7. Perkembangan penanganan kasus Novel Baswedan.
 - Polri telah bekerja maksimal dalam upaya penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti KPK, Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman serta membentuk Tim Gabungan yang melibatkan Penyidik KPK dan para pakar nasional.
 - Rencana tindak lanjut Polri adalah sebagai berikut:
 - Melakukan pencarian terhadap orang yang dicurigai sebagaimana rekonstruksi wajah berdasarkan keterangan saksi;
 - Menyebarkan sketsa wajah pencarian orang di berbagai tempat dan komunitas;
 - Menampung dan menindaklanjuti informasi yang diterima melalui *hotline*;
 - Mencari kendaraan roda dua (Vario 150 CC warna hitam tahun 2016-2017) sesuai rekaman CCTV;
 - Memberikan akses seluas-luasnya kepada tim dari KPK untuk melakukan verifikasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam penanganan perkara ini;
 - Melaksanakan analisis dan evaluasi secara rutin dan berkala (setiap minggu) mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Penyidik dan langkah tindak lanjutnya.

8. Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI tahun 2019 pada Polri.
 - Sampai dengan Semester I Tahun 2019, tindak lanjut yang telah dilaksanakan Polri dari 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) rekomendasi dengan nilai sebesar Rp. 211.814.456.034,78 (dua ratus sebelas miliar delapan ratus empat belas empat ratus lima puluh enam tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah), HKD 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu dolar Hongkong) dan USD 2.167.181,03 (dua juta seratus enam puluh tujuh seratus delapan puluh satu koma kosong tiga dolar US).

C. Beberapa hal yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengapresiasi Polda Banten terkait penanganan kasus mantan Menkopolhukam Wiranto dan gebrakan Kapolri terkait Polisi nakal yang minta proyek.
2. Pembinaan di internal Polri harus terus berjalan dengan maksimal dan meminta penjelasan terkait pembinaan personil Polri dimana sering kali mutasi dilakukan namun tidak sesuai dengan hasil asesmen.
3. Menyampaikan catatan dari Komnas Perempuan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat. Agar personal Polri diberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas terkait isu perempuan dan memiliki perspektif gender.
4. Menanyakan ada berapa kasus yang diajukan ke Pengadilan terkait TPPU narkoba.

5. Menanyakan bagaimana Polri melakukan deteksi dini terkait beberapa kasus seperti pembakaran rumah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga terkait bom Medan.
6. Mengapresiasi Polri karena pada tahun 2014-2018 mampu meraih opini WTP dari BPK dan Kapolri yang mencopot Kapolres karena tidak mendengarkan arahan Kapolri.
7. Menyampaikan agar Polri belajar dengan Arab Saudi terkait penanganan tindak pidana korupsi.
8. Terkait kasus kecelakaan Grab Wheels, ada UU Lalu Lintas yang menyatakan skuter adalah kendaraan bermotor dan harus tunduk pada regulasi sehingga perlu ada regulasi khusus mengenai skuter listrik. Menanyakan apakah Polri pernah menegur penyedia jasa sewa skuter listrik terkait keselamatan dalam penggunaan skuter listrik.
9. Menyampaikan bahwa Polri merupakan lembaga terbanyak kedua yang dilaporkan ke Ombudsman dan tidak ada indikasi peningkatan pelayanan publik menjadi lebih baik melainkan masih dibawah standar sehingga perlu menjadi introspeksi mengingat anggaran yang diberikan sudah besar.
10. Menanyakan penindakan dan kebijakan Polri terkait masih adanya polisi yang melakukan pemerasaan dan meminta klarifikasi terkait pencopotan Kapolres Kampar.
11. Meminta analisis kebutuhan dan jumlah personil Polri yang dibutuhkan di masa depan dan meminta analisa tertulis mengenai kesiapan Polri mengenai pelaksanaan program-programnya.
12. Menyarankan agar pemakaian seragam Polri dimasukkan ke dalam celana/rok agar terlihat lebih rapi.
13. Menyampaikan agar Kapolda Metro Jaya untuk duduk didepan pada Rapat Kerja berikutnya.
14. Menyampaikan kepada Kadiv. Propam, agar mengecek langsung ke daerah perihal hedonism Anggota Polri dan adanya Polisi yang menyusahkan Kepala Daerah.
15. Menyampaikan pentingnya Anggota Polri untuk tidak terlibat didalam proyek.
16. Menyampaikan bahwa dalam Pilkada Sumut yang lalu Polri tidak netral dan untuk menjaga netralitas pada Pilkada 2020, agar Kapolda tidak masuk ranah Pilkada selain yang terkait dengan tugasnya. Apabila ada Kapolda ingin maju pada Pilkada 2020 agar *fair* dan tidak menyalahgunakan jabatannya.
17. Menanyakan cara Polri dalam menghadapi demokrasi karena berdasarkan data YLBHI terdapat 606 (enam ratus enam ribu) korban dengan 51 (lima puluh satu) orang tewas dimana 6 (enam) orang tewas karena peluru tajam.
18. Berharap Polri dapat melaksanakan *Integrated Justice System* bisa dilaksanakan dengan baik.
19. Menanyakan terkait dengan *mapping* kerawanan daerah dan penggunaan anggaran penanganan terkait Pilkada 2020
20. Menanyakan bagaimana pengawasan Polri terkait *game online*.

21. Mengharapkan Polri mampu meningkatkan kemampuan dalam bidang IT karena ada 53,8 % persepsi masyarakat mengenai Pelayanan Polri yang berbelit.
22. Menanyakan perihal strategi dan rencana aksi untuk mengatasi kejahatan *skimming* yang luar biasa terjadi di Bali.
23. Berharap agar Polri juga menindak kejahatan di darat dan laut sehingga Polair harus diperkuat karena seringkali transaksi narkoba juga terjadi di laut.
24. Menanyakan strategi ke depan yang akan dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan narkoba karena Presiden pada 2015 pernah menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.
25. Mengusulkan agar Anggota Polri yang berhasil menangani Narkoba diberikan penghargaan dan mengusulkan adanya rapat khusus mengenai narkoba.
26. Mengusulkan adanya konseling yang diberikan pada anggota karena banyak polisi dengan kecenderungan stress seperti memukul supir ambulan, bunuh diri dsb.
27. Terkait lalu lintas, perlu ada penertiban yang jelas mengenai taksi dan ojek *online*.
28. Menanyakan bagaimana implementasi rencana strategi Polri.
29. Terkait kasus bom Mapolresta Medan bahwa ada 71 (tujuh puluh satu) orang yang ditangkap karena diduga teroris, dalam penanganannya agar Kapolda tidak berlebihan dan jangan mengeneralisir orang yang berkuda dan memanah adalah teroris.
30. Ada beberapa nama yang terkesan *intouchable* seperti Sukmawati, Permadi Arya dsb.
31. Diharapkan ada sinergi KPK dan Polri dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.
32. Menyampaikan bahwa perlu ada pemahaman menyeluruh oleh seluruh Anggota Polri mengenai apa yang dimaksud dengan promoter.
33. Menanyakan perspektif Polri terkait kasus terorisme dan perlu dimulai pencegahan di daerah perbatasan.
34. Perlu ada penekanan khusus 7 (tujuh) program Prioritas Kapolri pada Anggaran Polri.
35. Terkait pidato Presiden mengenai sinergitas, perlu ada koordinasi antara Polri dengan lembaga lainnya.
36. Meminta Polri untuk mengusut terkait dengan temuan BPK menyatakan bahwa telah terjadi kerugian akibat sewa gedung wisma mulia 1 dan 2 sebesar 238 Miliar Rupiah sampai dengan Oktober 2018. Sampai dengan hari ini sudah mencapai 350 Miliar Rupiah.
37. Menyampaikan agar 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan dikembalikan ke Polresta Tangerang.
38. Menanyakan alasan pengungkapan kasus Novel Baswedan lama sekali.

- D. Beberapa hal yang disampaikan oleh Kapolri diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Promoter merupakan bentuk akselerasi percepatan pencapaian tujuan Polri.
 2. Terkait Surat Edaran Kapolri mengenai larangan hidup mewah ditujukan agar aparat memulai melakukan perubahan dari internal Polri. Polri akan memulai revolusi mental dari internal Polri terlebih dahulu.
 3. Tidak akan ragu mencopot Anggota Polri yang terbukti terlibat narkoba dengan tidak hormat.
 4. Sistem *reward and punishment* sudah mulai dilakukan di internal Polri dan pengawasan internal akan terus dikembangkan.
 5. Polri akan melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya.
 6. Terkait kasus Novel baswedan, tim teknis masih terus bekerja mengungkap kasus ini.
 7. Membenarkan bahwa Polri masih kekurangan personil dalam melaksanakan tugasnya.
 8. Menyatakan dalam Pilkada 2020 mendatang jika terdapat Kapolda serta jajaran yang tidak netral maka akan dilakukan tindakan tegas dengan dimutasi/ diganti.
 9. Terkait kasus skuter listrik di daerah Senayan sudah ditangani oleh Polda Metro dan ke depannya akan didiskusikan dengan stakeholder lainnya
 10. Struktur Polri sudah menjadi 34 (tiga puluh empat) Satuan Tugas dan dipimpin oleh Kombes dan ke depannya akan ditambah lagi 800 (delapan ratus) personil di seluruh Indonesia.
 11. Terkait kasus pemberhentian Kapolres Kampar bahwa benar ada masalah etika sehingga Kapolres Kampar dicopot dari jabatannya.
 12. Terkait narkoba TPPU, ada banyak barang yang disita dan prosesnya sudah sampai Penuntut Umum dan Pengadilan.
 13. Menegaskan bahwa Radikalisme tidak bisa dikaitkan dengan agama apapun.
 14. Akan melakukan koordinasi dengan Kominfo terkait dengan *game online*.
 15. Terkait kasus *skimming*, Polri akan menjalin kerja sama dengan Interpol karena pelaku merupakan kelompok-kelompok yang berada di beberapa negara.
 16. Kabaharkam Firly Bahuri tidak akan diberhentikan dari Anggota Polri tapi akan melepas jabatan struktural ketika dilantik menjadi Ketua KPK Desember 2019 mendatang.
 17. Pembangunan Polres baru akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

III. KESIMPULAN

- A. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas Polri dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 dan memberikan sanksi tegas terhadap anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
- B. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar dalam proses pembinaan karir (promosi dan mutasi) di lingkungan Polri dilakukan secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan dengan mengedepankan penempatan personil yang tepat pada jabatan yang tepat, sehingga terwujudnya personil Polri yang profesional, modern dan terpercaya.

- C. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri agar lebih tegas dan cepat menuntaskan berbagai permasalahan hukum yang berkembang dan meresahkan masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, *cyber crime*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *illegal logging* dan kasus-kasus lainnya sesuai dengan 7 (tujuh) Program Prioritas Kapolri demi terwujudnya Polri yang profesional, unggul dan dipercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.00 WIB.

PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,

HERMAN HERRY
A-238